Policy Paper

Kebijakan Tata Kelola Pariwisata dalam Mewujudkan Pariwisata Terpadu Pada Kawasan Pariwisata Labuan Bajo

TIM PENYUSUN:

Dr. Heri Wahyudi, S.Sos., M.Si; Dr. Siti Hajar, S.Sos., MSP;
Nur Ambia Arma, S.AP., MAP; Dr. Eha Saleha, MAP

KATA PENGANTAR

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat hubungan sosial dan budaya di Indonesia. Dengan keberagaman potensi alam dan budaya yang dimiliki, Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia telah menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional, khususnya dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan pariwisata adalah Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Labuan Bajo, dengan keindahan alamnya yang mempesona dan keberadaan Taman Nasional Komodo sebagai salah satu destinasi wisata ikonik dunia, telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kawasan ini juga ditetapkan sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas nasional, dikenal sebagai "Bali Baru." Dengan statusnya sebagai destinasi prioritas, Labuan Bajo diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Namun, di tengah pertumbuhan pesat pariwisata di kawasan Labuan Bajo, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan, kurangnya infrastruktur yang memadai, serta dampak negatif terhadap lingkungan merupakan beberapa isu yang muncul. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata juga masih terbilang minim. Masyarakat setempat, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam memanfaatkan potensi pariwisata, sering kali belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari sektor ini. Dalam konteks ini, tata kelola pariwisata yang baik dan terintegrasi menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Policy paper ini disusun untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dengan menawarkan rekomendasi kebijakan tata kelola pariwisata yang dapat mendukung terwujudnya pariwisata terpadu di Labuan Bajo. Penyusunan kebijakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan terpadu diperlukan untuk menciptakan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, masyarakat lokal, serta komunitas internasional dalam mendukung pengembangan pariwisata yang lebih terkoordinasi dan efektif. Pariwisata terpadu yang dimaksud dalam policy paper ini mencakup pengelolaan yang holistik terhadap seluruh elemen pariwisata di Labuan Bajo, mulai dari atraksi wisata, infrastruktur, hingga pelayanan wisatawan. Tujuan utamanya adalah menciptakan kawasan pariwisata yang mampu memberikan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal. Dalam proses ini, pengelolaan lingkungan juga menjadi aspek yang sangat penting, mengingat Labuan Bajo merupakan kawasan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, khususnya di Taman Nasional Komodo. Keberlanjutan pariwisata di kawasan ini sangat bergantung pada

kemampuan para pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian alam sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penyusunan policy paper ini melalui proses kajian yang komprehensif, melibatkan tinjauan literatur, analisis data, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Dalam policy paper ini, pembaca akan menemukan analisis mendalam mengenai situasi terkini pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo, termasuk berbagai isu yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan. Lebih jauh, policy paper ini juga menawarkan serangkaian rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah dan pihak terkait dalam upaya memperbaiki tata kelola pariwisata di kawasan ini. Policy paper ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam merumuskan kebijakan tata kelola pariwisata yang lebih baik di Labuan Bajo. Kami berharap, rekomendasi kebijakan yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mewujudkan pariwisata terpadu yang berkelanjutan di kawasan ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan policy paper ini, baik melalui penelitian, diskusi, maupun masukan yang berharga. Semoga policy paper ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam upaya mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Labuan Bajo dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal serta kelestarian lingkungan. Labuan Bajo, sebagai salah satu permata pariwisata Indonesia, memiliki masa depan yang cerah. Dengan tata kelola yang baik, kami yakin bahwa kawasan ini akan terus berkembang menjadi destinasi wisata kelas dunia yang berkelanjutan dan inklusif.

Tim Penyusun, 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
RINGKASAN ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Metode Penelitian 6

BAB II TINJAUAN TEORITIS 8

BAB III PEMBAHASAN 11

BAB IV PENUTUP 23
A. Kesimpulan 23
B. Rekomendasi 24

DAFTAR PUSTAKA

RINGKASAN

Kawasan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia, terutama karena keindahan alam dan keunikan Taman Nasional Komodo. Meskipun memiliki potensi besar, pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan. Policy paper ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki tata kelola pariwisata di Labuan Bajo guna mewujudkan kawasan pariwisata terpadu yang seimbang dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pariwisata terpadu yang diinginkan adalah pariwisata yang dikelola secara koheren dan sinergis antara berbagai elemen, seperti atraksi wisata, akomodasi, fasilitas umum, transportasi, dan pelayanan wisata. Pengelolaan yang baik dapat meningkatkan daya saing pariwisata, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya. Labuan Bajo memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan dunia. Namun, tata kelola yang baik, berbasis pada prinsip keberlanjutan dan inklusi masyarakat lokal, sangat diperlukan untuk mewujudkan pariwisata terpadu. Dengan kebijakan yang terkoordinasi dan pelaksanaan yang efektif, Labuan Bajo dapat menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan tata kelola pariwisata yang efektif harus memprioritaskan pendekatan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, beberapa poin utama perlu diperhatikan: 1) Pengembangan infrastruktur; 2) Koordinasi antar-pemangku kepentingan; 3) Pemberdayaan masyarakat lokal; 4) Perlindungan lingkungan; 5) Diversifikasi produk wisata; 6) Promosi dan branding pariwisata. Dengan mengadopsi kebijakan tata kelola pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, Labuan Bajo dapat menjadi model kawasan pariwisata yang tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan pengelolaan pariwisata di kawasan ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pariwisata telah menjadi salah satu sumber devisa utama setelah migas, batubara, dan kelapa sawit. Salah satu destinasi wisata yang berkembang pesat di Indonesia adalah Labuan Bajo, yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo telah menjadi pintu gerbang utama menuju Taman Nasional Komodo, yang terkenal di dunia sebagai habitat asli komodo, satwa purba yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Namun, meskipun Labuan Bajo telah menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia, kawasan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaannya. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah perlunya kebijakan tata kelola pariwisata yang efektif untuk mewujudkan pariwisata terpadu di kawasan ini. Tata kelola pariwisata yang baik merupakan kunci untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. https://ekonomi.republika.co.id/berita/sda5no457/bpolbf-ungkap-empat-isu-utama-pariwisata-labuan-bajo-ntt

Labuan Bajo memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. Selain Taman Nasional Komodo, kawasan ini juga memiliki kekayaan bawah laut yang menakjubkan, pantai-pantai yang indah, serta budaya lokal yang kaya dan unik. Semua ini menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan meningkatnya popularitas Labuan Bajo, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah wisatawan ini juga membawa tantangan tersendiri. Pertama, adanya tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan, terutama terkait dengan pengelolaan sampah, konservasi ekosistem laut, dan kerusakan habitat alam. Kedua, adanya risiko over-tourism yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Ketiga, masalah infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung lonjakan jumlah wisatawan, seperti aksesibilitas transportasi, ketersediaan air bersih, dan sanitasi. Dalam konteks ini,

diperlukan kebijakan tata kelola pariwisata yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kebijakan ini harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya, sehingga tercipta pariwisata yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga berkelanjutan (Pariwisata, 2016).

Kebijakan tata kelola pariwisata terpadu merupakan pendekatan yang sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Labuan Bajo, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pendekatan terpadu ini mengharuskan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat, serta para pemangku kepentingan lainnya (Hajar et al., 2024); (Brunetta et al., 2018). Semua pihak harus berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pariwisata di Labuan Bajo.

Pariwisata terpadu adalah konsep pembangunan pariwisata yang mencakup koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kementerian PUPR, 2020); (Rochim, 2018). Pendekatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pelibatan masyarakat lokal, serta penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pariwisata tanpa merusak lingkungan dan budaya setempat. Salah satu aspek penting dalam kebijakan tata kelola pariwisata terpadu adalah pengembangan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang baik merupakan fondasi utama dalam mendukung pengembangan pariwisata. Di Labuan Bajo, pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, serta fasilitas pendukung lainnya harus diprioritaskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga penting untuk mendukung kegiatan ekonomi lokal, seperti perdagangan, perikanan, dan jasa. Selain pengembangan infrastruktur, kebijakan tata kelola pariwisata terpadu juga harus mencakup aspek pelestarian lingkungan (Nitivattananon & Srinonil, 2019). Lingkungan yang terjaga merupakan modal utama bagi keberlanjutan pariwisata. Oleh karena itu, dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, perlu adanya kebijakan yang tegas terkait pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta pengendalian dampak negatif dari kegiatan pariwisata terhadap ekosistem. Dalam hal ini, perlu diterapkan prinsip- prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan konservasi.

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi salah satu prinsip dasar dalam kebijakan tata kelola pariwisata di Labuan Bajo, karna Masyarakat setempat harus menjadi aktor utama dalam pengembangan pariwisata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa manfaat dari kegiatan pariwisata dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat pembangunan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti peningkatan kapasitas dalam pengelolaan homestay, pengembangan produk kerajinan lokal, pelatihan dalam industri jasa pariwisata, serta penyediaan akses permodalan. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pariwisata, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka dapat terakomodasi dengan baik.

Kebijakan tata kelola pariwisata yang efektif memerlukan integrasi yang baik antar sektor. Sektor-sektor seperti perhubungan, energi, lingkungan hidup, dan kebudayaan harus berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pariwisata terpadu di Labuan Bajo. Misalnya, sektor perhubungan berperan penting dalam pengembangan aksesibilitas, sedangkan sektor energi dapat berkontribusi dalam penyediaan energi yang ramah lingkungan untuk kebutuhan pariwisata. Di sisi lain, sektor lingkungan hidup memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak merusak ekosistem yang ada. Selain itu, integrasi kebijakan juga harus mencakup kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat, melalui kementerian terkait, dapat memberikan arahan strategis dan dukungan finansial, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas implementasi kebijakan di lapangan. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lokal dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Meskipun kebijakan tata kelola pariwisata terpadu memiliki banyak manfaat, implementasinya di lapangan tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah masalah koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara sektor-sektor terkait. Hal ini seringkali menyebabkan kebijakan yang diambil tidak berjalan sesuai rencana. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, finansial, maupun teknis. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memerlukan investasi yang besar, baik dalam hal infrastruktur maupun dalam upaya konservasi lingkungan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam kapasitas sumber daya

manusia, terutama dalam hal manajemen pariwisata yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi internasional.

B. Identifikasi Masalah

Labuan Bajo, sebuah kawasan wisata yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah berkembang menjadi salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia. Dikenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, kawasan ini menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara karena keindahan alamnya yang luar biasa, termasuk pemandangan laut yang memukau, keberadaan spesies komodo yang langka, serta kekayaan budaya masyarakat setempat. Namun, perkembangan pariwisata yang pesat ini juga membawa berbagai tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan tata kelola yang efektif dan berkelanjutan. Terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi terkait dengan kebijakan tata kelola pariwisata dalam mewujudkan pariwisata terpadu di kawasan pariwisata Labuan Bajo, sebagai berikut:

1. Kerusakan lingkungan dan ekosistem

   Salah satu masalah utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo adalah tekanan terhadap lingkungan dan ekosistem setempat. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang signifikan dari tahun ke tahun telah memberikan dampak besar terhadap kelestarian lingkungan. Taman Nasional Komodo, yang menjadi daya tarik utama, merupakan kawasan yang rentan terhadap kerusakan. Habitat alami komodo, serta terumbu karang di sekitar kepulauan ini, menghadapi ancaman degradasi akibat aktivitas wisata yang tidak dikelola dengan baik. Contoh konkret adalah aktivitas snorkeling dan diving yang tidak diatur secara ketat, serta pembangunan infrastruktur wisata yang merusak ekosistem pantai dan laut. Tanpa regulasi yang ketat dan kebijakan yang jelas mengenai daya dukung lingkungan, potensi kerusakan ini akan semakin besar. Pengelolaan ekosistem laut dan darat, termasuk perlindungan habitat komodo, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan.

2. Keterbatasan infrastruktur pendukung

   Kendala lain yang signifikan dalam pengembangan pariwisata terpadu di Labuan Bajo adalah keterbatasan infrastruktur dasar. Meski telah dilakukan beberapa

pembangunan infrastruktur, banyak fasilitas yang masih belum memadai untuk mendukung lonjakan wisatawan. Infrastruktur seperti transportasi, aksesibilitas, pengelolaan air bersih, sanitasi, serta listrik seringkali belum memenuhi standar untuk kawasan wisata internasional. Misalnya, aksesibilitas ke beberapa destinasi wisata di kawasan ini masih terbatas, terutama transportasi antar pulau yang tidak teratur. Selain itu, ketersediaan fasilitas publik, seperti toilet umum yang bersih dan layak, serta sistem pengelolaan sampah yang efisien, masih menjadi masalah yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan serta menjaga kebersihan dan keindahan kawasan.

3. Kurangnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal

   Meskipun pariwisata di Labuan Bajo mengalami perkembangan pesat, manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal masih terbatas. Banyak sektor ekonomi pariwisata, seperti perhotelan dan operator tur, didominasi oleh investor luar yang tidak sepenuhnya melibatkan penduduk setempat. Akibatnya, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, kesenjangan antara masyarakat lokal dan pelaku usaha dari luar semakin terasa. Pemberdayaan masyarakat lokal, baik dalam pengelolaan usaha pariwisata maupun dalam memperoleh keterampilan yang relevan, menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata sangat diperlukan agar mereka bisa berperan aktif dan memperoleh manfaat yang adil dari perkembangan pariwisata di daerah mereka sendiri.

4. Ketidakselarasan regulasi dan koordinasi lintas sektor

   Pengembangan pariwisata terpadu membutuhkan koordinasi yang kuat antara berbagai sektor, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Namun, salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakselarasan regulasi dan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam beberapa kasus, terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat proses perizinan dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, kurangnya koordinasi antara sektor pariwisata, lingkungan, transportasi, serta ekonomi menyebabkan kebijakan yang diterapkan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini mengakibatkan kebijakan yang seharusnya mendukung pengelolaan pariwisata terpadu tidak dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

5. Minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM)

   Salah satu tantangan besar dalam mewujudkan pariwisata terpadu di Labuan Bajo adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di sektor pariwisata. Industri pariwisata modern memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang mumpuni dalam pelayanan, manajemen destinasi, serta kemampuan bahasa asing untuk berinteraksi dengan wisatawan internasional. Saat ini, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan industri pariwisata yang semakin global dengan kapasitas SDM lokal yang tersedia. Minimnya akses pelatihan profesional dan pendidikan formal di bidang pariwisata menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas SDM di Labuan Bajo, sehingga banyak posisi penting dalam industri pariwisata diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

C. Metode Penelitian

Penyusunan policy paper mengenai kebijakan tata kelola pariwisata dalam mewujudkan pariwisata terpadu di kawasan Labuan Bajo memerlukan pendekatan metodologi penelitian yang komprehensif dan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan harus mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi yang berbasis data dan fakta terkait dengan masalah tata kelola pariwisata di kawasan ini. Pendekatan yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam tata kelola pariwisata di Labuan Bajo. Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi isu-isu utama, persepsi pemangku kepentingan, dan kompleksitas yang terkait dengan pengelolaan pariwisata terpadu. (Neergaard & Ulhøi, 2007)

Wawancara menjadi salah satu teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini tentang kebijakan tata kelola pariwisata dalam mewujudkan pariwisata terpadu pada kawasan pariwisata Labuan Bajo. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pejabat pemerintah daerah dan pusat, pelaku industri pariwisata, perwakilan masyarakat lokal, serta LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan pariwisata. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pandangan mereka tentang masalah tata kelola, tantangan, dan peluang dalam pengembangan pariwisata terpadu di Labuan Bajo. Selain wawancara juga dilakukan observasi partisipatif yang dilakukan dengan berpartisipasi langsung dalam kegiatan pariwisata di Labuan Bajo, seperti kunjungan ke

destinasi wisata utama, mengamati interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, serta pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Observasi ini akan memberikan data empiris mengenai kondisi lapangan yang sebenarnya dan dampaknya terhadap ekosistem dan sosial budaya setempat.

Hasil dari wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan melakukan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang terkumpul. Tema-tema tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan isu-isu yang relevan, seperti masalah lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, keterbatasan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Analisis ini juga akan membandingkan kondisi di Labuan Bajo dengan praktik terbaik (*best practices*) dari destinasi pariwisata lain yang berhasil mengimplementasikan konsep pariwisata terpadu. Dalam konteks pengembangan pariwisata terpadu di kawasan Labuan Bajo, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan metode yang penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan tata kelola pariwisata. Analisis ini membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan dalam mencapai pariwisata terpadu dan berkelanjutan di kawasan tersebut.(Simarmata & Triastuti, 2021)

BAB II
TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan tata kelola pariwisata di Indonesia secara umum diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang bertanggung jawab untuk merumuskan strategi, peraturan, dan program untuk mengembangkan sektor pariwisata nasional. Salah satu kebijakan penting dalam konteks Labuan Bajo adalah penetapannya sebagai salah satu dari "10 Bali Baru," yang merupakan program pemerintah untuk mengembangkan sepuluh destinasi pariwisata prioritas selain Bali. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat branding dan pemasaran destinasi wisata tersebut di pasar internasional. (Syariah, 2020)

Tata kelola pariwisata merujuk pada serangkaian proses dan mekanisme yang mengarahkan, mengendalikan, dan mengelola sektor pariwisata dengan tujuan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Tata kelola pariwisata adalah konsep yang mencakup pengaturan, pengendalian, serta pengelolaan sektor pariwisata oleh berbagai aktor, baik dari pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Menurut (Mergel et al., 2021); (Volgger & Pechlaner, 2015), tata kelola pariwisata melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Prinsip-prinsip tata kelola pariwisata yang baik mencakup transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Di dalam tata kelola pariwisata, peran pemerintah sangat krusial, terutama dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dan bahwa nilai-nilai budaya serta lingkungan dilindungi.

Dalam konteks kawasan Labuan Bajo, yang merupakan destinasi wisata yang sedang berkembang pesat, tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang terpadu. Pariwisata terpadu adalah konsep di mana pembangunan dan pengelolaan destinasi wisata melibatkan berbagai aspek, termasuk perencanaan yang sistematis, partisipasi aktif masyarakat lokal, perlindungan terhadap lingkungan, serta koordinasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). Pariwisata terpadu juga mencakup pengelolaan infrastruktur, promosi wisata, dan daya tarik wisata secara holistik

sehingga destinasi dapat berkembang secara harmonis. Lebih lanjut, menurut (Dredge & Jamal, 2015); (Challies et al., 2017), tata kelola pariwisata yang efektif harus melibatkan kolaborasi multi-stakeholder, di mana sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat lokal bekerja bersama untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diperlukan untuk menghindari konflik kepentingan antara pelaku pariwisata dan masyarakat lokal, serta untuk memastikan bahwa dampak positif pariwisata dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pariwisata terpadu merupakan pendekatan pembangunan pariwisata yang mengintegrasikan berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dalam suatu kerangka kebijakan yang holistik (Moerwanto & Junoasmono, 2017). Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai komponen pariwisata sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan (Brendehaug et al., 2017). Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya perencanaan yang komprehensif dan terkoordinasi antara berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Menurut (Almeida et al., 2017), pariwisata terpadu membutuhkan kerangka kerja yang memungkinkan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, sektor swasta, dan pemerintah. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai, pelestarian lingkungan, perlindungan terhadap warisan budaya, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Di kawasan Labuan Bajo, penerapan konsep pariwisata terpadu menjadi sangat relevan mengingat tantangan kompleks yang dihadapi, seperti ancaman terhadap ekosistem Taman Nasional Komodo, keterbatasan infrastruktur, serta kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pelaku usaha pariwisata.

Kebijakan pariwisata terpadu adalah pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan sinergi antara berbagai komponen yang terlibat dalam industri pariwisata, termasuk lingkungan alam, budaya lokal, dan ekonomi. (Inskeep, 1991) menjelaskan bahwa pariwisata terpadu mengacu pada perencanaan dan pengembangan wisata yang menyeluruh, dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan, keseimbangan pembangunan, serta partisipasi aktif masyarakat lokal. Kebijakan ini penting untuk menghindari pembangunan yang tidak terkontrol, yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan ketidakadilan sosial. Dalam kasus Labuan Bajo, konsep pariwisata terpadu sangat relevan karena kawasan ini memiliki keunikan dari segi keanekaragaman hayati dan budaya lokal. (Elliott, 1997); (An et al., 2021) menekankan pentingnya kebijakan yang fokus pada perlindungan sumber daya alam,

terutama dalam kawasan sensitif seperti Taman Nasional Komodo. Kebijakan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang justru mengurangi daya tarik wisatawan dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat lokal dalam tata kelola pariwisata didasarkan pada pandangan bahwa masyarakat setempat adalah pemangku kepentingan utama yang terkena dampak langsung dari pengembangan pariwisata. Menurut (Reid, 2017), partisipasi masyarakat dalam pariwisata dapat dilihat dari tiga bentuk:

1. Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses perencanaan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur.
2. Partisipasi ekonomi, dimana masyarakat harus memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata, baik sebagai tenaga kerja maupun pemilik usaha.
3. Partisipasi sosial, berkaitan dengan pariwisata harus mendukung pelestarian budaya lokal dan tidak merusak nilai-nilai sosial yang ada

BAB III
PEMBAHASAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam, yang menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang utama. Salah satu destinasi pariwisata yang saat ini tengah berkembang pesat dan mendapatkan perhatian besar baik dari pemerintah pusat maupun internasional adalah kawasan pariwisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Terkenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo memiliki potensi luar biasa dalam pengembangan pariwisata terpadu yang berkelanjutan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga global. Namun, pengembangan kawasan ini menghadapi tantangan kompleks yang membutuhkan kebijakan tata kelola yang terstruktur, komprehensif, dan terpadu.

Labuan Bajo, sebagai bagian dari destinasi wisata prioritas nasional yang telah ditetapkan sebagai bagian dari "10 Bali Baru", memiliki peluang besar untuk menjadi model pariwisata terpadu di Indonesia. Dengan daya tarik utama Taman Nasional Komodo yang diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, kawasan ini berpotensi menjadi destinasi pariwisata kelas dunia. Namun, potensi ini hanya bisa terwujud melalui kebijakan tata kelola yang baik, yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, hingga infrastruktur. Terdapat beberapa destinasi wisata yang menjadi potensi yang prioritas yang dapat dikembangkan baik di tingkat nasional maupun internasional, sebagai berikut: https://travel.kompas.com/image/2020/08/31/150300827/10-tempat-wisata-di-labuan-bajo-bisa-ke-mana-saja?lgn_method=google&google_btn=onetap

1. Bukit Cinta

2. Pulau Kelor

3. Pulau Komodo

4. Wisata Snorkeling di Pulau Manjerite

5. Pulau Padar

6. Pulau Giri Laba

7. Wisata Goa Batu Cermin

8. Air Terjun Cuaca Wulang

9. Penari Caci di Kampung Melo Manggarai Barat

Kawasan Labuan Bajo mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan jumlah wisatawan yang signifikan baik domestik maupun mancanegara. Dalam kurun waktu 2015-2019, jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini meningkat tajam, khususnya setelah ditetapkannya sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat bahwa hingga akhir 2019, jumlah kunjungan wisatawan mencapai ratusan ribu orang per tahun, dengan proporsi wisatawan mancanegara yang semakin meningkat.

Pesatnya perkembangan ini membawa implikasi besar terhadap kebutuhan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang, serta tekanan terhadap lingkungan hidup.

Sayangnya, meskipun terdapat potensi besar, tata kelola pariwisata di Labuan Bajo masih dihadapkan pada berbagai persoalan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah:

1. Tekanan Lingkungan Hidup

   Kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo adalah ekosistem yang sangat rapuh. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati, khususnya terhadap habitat komodo dan terumbu karang. Ada kekhawatiran bahwa degradasi lingkungan akan semakin meningkat jika kebijakan pengelolaan wisata yang berbasis pada daya dukung lingkungan tidak segera diterapkan.

2. Keterbatasan Infrastruktur

   Meskipun Labuan Bajo terus dikembangkan sebagai destinasi wisata internasional, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, energi, dan transportasi masih belum sepenuhnya memadai untuk menampung lonjakan jumlah wisatawan. Selain itu, aksesibilitas ke destinasi wisata di luar pulau utama, seperti Pulau Komodo dan Pulau Rinca, masih memerlukan peningkatan.

3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

   Di tengah berkembangnya industri pariwisata, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Banyak pelaku usaha pariwisata, khususnya di sektor akomodasi dan tur, dikelola oleh investor luar, sementara masyarakat lokal cenderung hanya berperan sebagai tenaga kerja dengan pendapatan yang relatif rendah.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

   Pariwisata terpadu memerlukan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam bidang perhotelan, turisme, serta manajemen destinasi. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi di Labuan Bajo adalah minimnya sumber daya manusia lokal yang memiliki kemampuan sesuai standar industri pariwisata internasional.

5. Potensi Konflik Lahan

   Dengan meningkatnya investasi di sektor pariwisata, muncul masalah terkait kepemilikan dan penggunaan lahan. Banyak lahan di sekitar kawasan Labuan Bajo yang mulai diakuisisi oleh investor untuk pembangunan hotel, resort, dan fasilitas wisata

lainnya, yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada lahan tersebut.

Kebijakan tata kelola pariwisata merupakan instrumen penting untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas. Tata kelola yang baik harus mencakup perencanaan yang komprehensif, keterlibatan semua pemangku kepentingan, pengawasan yang ketat, serta koordinasi lintas sektor. Untuk mewujudkan pariwisata terpadu di Labuan Bajo, diperlukan kebijakan yang terfokus pada beberapa aspek berikut:

1. Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

   Pentingnya menerapkan kebijakan yang menjamin keberlanjutan ekosistem di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, misalnya dengan membatasi jumlah kunjungan wisatawan per hari sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pengembangan wisata berbasis ekologi (ecotourism) yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama juga bisa menjadi alternatif untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

2. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

   Kebijakan tata kelola pariwisata harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur penunjang wisata, seperti bandara, pelabuhan, jalan, serta fasilitas umum lainnya, dirancang dan dibangun dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Infrastruktur yang memadai juga harus mencakup aksesibilitas yang lebih baik ke destinasi wisata lain di sekitarnya, termasuk konektivitas antar pulau.

3. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

   Salah satu prinsip dasar dari pariwisata terpadu adalah partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata. Pemerintah harus mendorong kebijakan yang memberdayakan masyarakat setempat melalui pelatihan dan pendidikan pariwisata, serta mendorong kewirausahaan di sektor pariwisata lokal. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pariwisata bisa dirasakan langsung oleh penduduk lokal.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

   Kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM dalam industri pariwisata menjadi sangat krusial. Program pelatihan dan pendidikan pariwisata harus lebih intensif dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dengan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku industri pariwisata. Ini akan memastikan bahwa SDM lokal mampu bersaing di pasar global.

5. Pengembangan Wisata Budaya dan Wisata Berbasis Komunitas

   Selain alam, kebudayaan lokal juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Kebijakan tata kelola harus mendukung pengembangan wisata budaya dan wisata berbasis komunitas (community-based tourism), yang dapat menjaga kelestarian tradisi dan budaya lokal sembari memberikan alternatif penghasilan bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan pariwisata terpadu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan sejumlah program strategis dalam rangka pengembangan kawasan wisata prioritas termasuk Labuan Bajo. Namun, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain pemerintah, sektor swasta sebagai investor dan pengembang juga memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa investasi yang dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Sinergi antara sektor swasta dan pemerintah, melalui skema public-private partnership (PPP), bisa menjadi model yang efektif dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas wisata yang ramah lingkungan. Di sisi lain, masyarakat lokal dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Ini penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata kelas dunia. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut, diperlukan kebijakan tata kelola pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek, seperti pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan integrasi antar sektor. Selain itu, implementasi kebijakan tersebut juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan serta dukungan sumber daya yang memadai. Dengan kebijakan tata kelola yang tepat, Labuan Bajo tidak hanya akan menjadi destinasi wisata kelas dunia, tetapi juga menjadi contoh sukses bagaimana pariwisata terpadu dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Labuan Bajo, yang sedang berada pada fase pertumbuhan pesat, berisiko menghadapi masalah ini jika kebijakan tata kelola tidak diarahkan pada keberlanjutan. Hunter (1997) mengusulkan bahwa pembangunan pariwisata yang berkelanjutan harus memperhitungkan:

1. Kapasitas lingkungan

   Daya dukung alam harus dihitung dengan cermat agar tidak terjadi kerusakan permanen.
2. Partisipasi lokal

   Masyarakat harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan pembangunan agar dapat merasakan manfaat langsung dari industri pariwisata.
3. Manfaat ekonomi yang berkeadilan

   Pariwisata harus memberi keuntungan yang adil kepada masyarakat lokal, dan bukan hanya kepada pelaku bisnis besar atau investor luar daerah.

Di Labuan Bajo, partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata masih menjadi tantangan. Seringkali, masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata, terutama dalam hal perencanaan penggunaan lahan dan pengelolaan destinasi wisata. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau investor yang mengembangkan infrastruktur pariwisata. Dengan demikian, dapat dijabarkan hasil analisis SWOT dari kebijakan tata kelola pariwisata dalam mewujudkan pariwisata terpadu di Kawasan Labuan Bajo, sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik SWOT Kebijakan Tata Kelola Pariwisata dalam Mewujudkan Pariwisata Terpadu di Kawasan Labuan Bajo

Internal / Eksternal	Kekuatan (Strenghts):	Kelemahan (Weakness):
	1. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, yang merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO dan rumah bagi komodo, satwa purba yang hanya ditemukan di wilayah ini. Selain itu, kawasan ini juga memiliki keindahan alam bawah laut, terumbu karang, serta pantai yang menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. 2. Pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, sangat mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur, seperti pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan ini. 3. Labuan Bajo telah mengalami peningkatan dalam hal infrastruktur, seperti bandara internasional yang menghubungkan kawasan ini dengan kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri. Pembangunan fasilitas hotel, restoran, dan penginapan juga terus berkembang. 4. Banyak investasi swasta telah diarahkan ke Labuan Bajo, baik dari sektor perhotelan, operator tur, hingga pengembang properti. Ini memberikan potensi besar untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal fasilitas wisata.	1. Salah satu kelemahan utama dalam pengembangan pariwisata terpadu di Labuan Bajo adalah tata kelola yang belum terkoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pelaku industri pariwisata. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dengan pelaksanaan di lapangan, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan. 2. Meskipun sektor pariwisata di Labuan Bajo berkembang pesat, partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata masih minim. Banyak penduduk setempat yang merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan belum mendapatkan manfaat ekonomi yang signifikan dari sektor ini. Ini menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, yang dapat menghambat keberlanjutan jangka panjang. 3. SDM lokal yang terlibat dalam sektor pariwisata masih terbatas dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM untuk menghadapi industri pariwisata global menjadi salah satu kendala dalam menciptakan pariwisata terpadu yang berkualitas. 4. Pengelolaan lingkungan, terutama di kawasan yang sensitif seperti Taman Nasional Komodo, masih menjadi tantangan besar. Peningkatan jumlah wisatawan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat berpotensi menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang dan satwa liar, serta meningkatkan polusi di kawasan ini.
Peluang (Opportunity): 1. Labuan Bajo telah menjadi salah satu destinasi wisata yang paling diminati di Indonesia, dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahun. Ini memberikan peluang besar untuk	Alternatif Strategi (SO): 1. Labuan Bajo dapat mempromosikan pariwisata yang berfokus pada ekowisata dan konservasi sebagai respons terhadap tren global pariwisata berkelanjutan. Keindahan alam dan keanekaragaman hayati dapat	Alternatif Strategi (WO): 1. Untuk mengatasi keterbatasan SDM, pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi dalam bidang perhotelan, pariwisata berkelanjutan,

mengembangkan sektor pariwisata, terutama dalam mempromosikan ekowisata dan pariwisata yang berkelanjutan. 2. Tren global menuju pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan memberikan peluang besar bagi Labuan Bajo untuk memanfaatkan sumber daya alamnya secara bijak. Inisiatif seperti pengelolaan limbah yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan di hotel-hotel, dan ekowisata dapat meningkatkan daya tarik kawasan ini sekaligus melindungi lingkungan 3. Sebagai kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi, Labuan Bajo mendapatkan perhatian dari berbagai organisasi internasional yang bergerak di bidang konservasi dan pariwisata berkelanjutan, seperti UNESCO, WWF, dan UNWTO. Kolaborasi dengan organisasi-organisasi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata yang berkelanjutan di kawasan tersebut. 4. Selain Taman Nasional Komodo, kawasan Labuan Bajo memiliki potensi untuk mengembangkan bentuk-bentuk wisata lain, seperti wisata budaya, wisata kuliner, dan wisata petualangan. Diversifikasi produk wisata dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan dan meningkatkan pengeluaran wisatawan di kawasan tersebut	menjadi daya tarik utama yang dikombinasikan dengan pengalaman edukasi tentang pelestarian alam. 2. Memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola jumlah wisatawan, memonitor kondisi lingkungan, dan memasarkan destinasi secara global. Penggunaan aplikasi untuk pemesanan tiket, informasi destinasi, dan pelaporan lingkungan akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dan pengalaman wisatawan. 3. Menggunakan status sebagai destinasi super prioritas untuk menarik investasi yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur berkelanjutan, seperti energi terbarukan, manajemen limbah, dan transportasi ramah lingkungan. Hal ini akan mendukung konsep pariwisata terpadu yang berkelanjutan	serta keterampilan bahasa asing. Peningkatan kapasitas ini akan meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Labuan Bajo. 2. Kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan dapat diatasi melalui penerapan sistem informasi terpadu yang memungkinkan semua pihak terkait (pemerintah, investor, masyarakat lokal) untuk berbagi data dan berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan destinasi.
Tantangan (Treaths): 1. Salah satu ancaman terbesar bagi pariwisata di Labuan Bajo adalah overtourism, di mana jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas daya dukung kawasan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki. Penurunan kualitas lingkungan ini pada akhirnya akan mengurangi daya tarik wisatawan dan	Alternatif Strategi (ST): 1. Untuk menghindari over-tourism dan menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah dan pengelola dapat memberlakukan kuota wisatawan per hari atau per tahun. Ini dapat didukung oleh kebijakan harga tiket yang lebih tinggi bagi wisatawan asing sebagai bagian dari upaya konservasi. 2. Kekuatan alam yang dimiliki Labuan Bajo harus dilindungi melalui regulasi ketat mengenai	Alternatif Strategi (WT): 1. Pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah kepemilikan lahan melalui mediasi yang melibatkan semua pihak. Partisipasi masyarakat lokal harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang dan pengembangan destinasi untuk mencegah konflik lebih lanjut. 2. Pembangunan pariwisata yang tidak terkendali harus dihindari dengan memperketat pengawasan dan

merusak reputasi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata alam yang indah. 2. Pariwisata sangat bergantung pada situasi ekonomi global. Krisis ekonomi, perubahan kebijakan visa, atau hambatan perjalanan internasional dapat secara langsung mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata bagaimana sektor pariwisata bisa terdampak secara signifikan oleh perubahan global yang tidak terduga. 3. Labuan Bajo menghadapi persaingan dengan destinasi wisata lain, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara, yang menawarkan keunikan alam dan budaya. Destinasi seperti Bali, Lombok, dan Raja Ampat menjadi pesaing yang cukup kuat dalam menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. 4. Labuan Bajo, seperti kawasan pesisir lainnya, rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, seperti naiknya permukaan air laut, badai, dan pemanasan global yang dapat merusak ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan habitat komodo. Ancaman ini dapat mempengaruhi daya tarik wisata di kawasan tersebut.	pembangunan fisik dan penggunaan sumber daya alam. Pengelolaan limbah, perlindungan kawasan laut, dan regulasi terhadap kegiatan wisata harus diimplementasikan dengan tegas untuk menghindari kerusakan jangka panjang.	memastikan bahwa semua proyek infrastruktur mematuhi standar keberlanjutan. Kajian lingkungan yang mendalam harus menjadi syarat wajib sebelum proyek disetujui

Sumber: Pengolahan Data, Tahun 2024

Berdasarkan analisis SWOT di atas, kebijakan tata kelola pariwisata terpadu di kawasan Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk mendukung perkembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Keanekaragaman hayati yang unik, dukungan pemerintah, serta partisipasi masyarakat lokal merupakan kekuatan utama yang dapat dioptimalkan. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, ancaman kerusakan lingkungan, dan koordinasi antar-stakeholder yang belum optimal perlu diatasi melalui kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Implementasi tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilan Labuan Bajo dalam mewujudkan pariwisata terpadu yang berkelanjutan.

Labuan Bajo memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di tingkat internasional. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, potensi ini tidak akan maksimal dan justru dapat menimbulkan kerusakan jangka panjang, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dengan penerapan kebijakan tata kelola yang terpadu dan berkelanjutan, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal, Labuan Bajo dapat menjadi model kawasan pariwisata terpadu yang berhasil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Reorientasi kebijakan ke arah pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pariwisata di Labuan Bajo tetap berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kawasan pariwisata Labuan Bajo, yang terletak di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu destinasi wisata prioritas nasional yang telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keberadaan Taman Nasional Komodo menjadikan Labuan Bajo sebagai magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, di tengah potensi besar yang dimiliki, pengelolaan pariwisata di kawasan ini menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan pariwisata terpadu yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Beberapa tantangan yang ditemukan dalam tata kelola pariwisata di Labuan Bajo meliputi masalah infrastruktur yang belum memadai, dampak negatif terhadap lingkungan, belum optimalnya keterlibatan masyarakat lokal, dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola yang belum terintegrasi dan berkesinambungan juga menjadi hambatan utama dalam mengembangkan pariwisata di kawasan ini. Untuk mewujudkan pariwisata terpadu yang ideal, kebijakan tata kelola pariwisata di Labuan Bajo harus lebih berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan inklusif.

Kawasan pariwisata terpadu adalah kawasan di mana seluruh elemen pariwisata—seperti atraksi wisata, akomodasi, transportasi, fasilitas penunjang, dan pelayanan—dikelola secara terkoordinasi, sehingga menciptakan sinergi yang kuat antara berbagai sektor. Dalam konteks Labuan Bajo, kebijakan tata kelola pariwisata yang terpadu harus mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam rantai ekonomi pariwisata. Pengembangan pariwisata Labuan Bajo juga harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan industri pariwisata dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Aspek sosial menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal agar mampu berpartisipasi secara aktif dan merasakan manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata. Sementara itu, aspek lingkungan menekankan pada pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama kawasan ini.

Terdapat beberapa komponen yang menjadi temuan dalam kajian ini, yaitu

1. Tata kelola yang belum terintegrasi, hal ini terkait dengan adanya tumpang tindih kebijakan, pelaksanaan program yang tidak efektif, serta kurangnya sinergi antara berbagai pihak (pemerintah, pemangku kepentingan swasta dan masyarakat)
2. Pembangunan infrastruktur yang belum merata, hal ini mencakup aksesibilitas yang terbatas sehingga menghambat pengembangan potensi wisata di kawasan tersebut.
3. Ancaman terhadap kelestarian lingkungan, melalui peningkatan jumlah wisatawan tanpa pengelolaan yang baik dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem alam, terutama di kawasan Taman Nasional Komodo. Risiko kerusakan ekosistem laut, deforestasi, serta pencemaran lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pariwisata di masa depan.
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan pariwisata.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan tata kelola pariwisata di Labuan Bajo dalam rangka mewujudkan pariwisata terpadu, yaitu

1. Penyusunan kebijakan tata kelola pariwisata terpadu yang berkelanjutan
2. Pengembangan infrastruktur pariwisata yang terpadu
3. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan
4. Tingkatkan pemberdayaan masyarakat lokal
5. Terapkan kebijakan pariwisata berbasis lingkungan
6. Pengembangan diversifikasi produk pariwisata
7. Tingkatkan promosi dan branding pariwisata Labuan Bajo
8. Tingkatkan sistem data dan informasi pariwisata
9. Penguatan kerjasama Internasional

DAFTAR PUSTAKA

Almeida, J., Costa, C., & Nunes da Silva, F. (2017). A framework for conflict analysis in spatial planning for tourism. *Tourism Management Perspectives*, *24*(February), 94–106. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.021

An, Y., Lin, X., Li, M., & He, F. (2021). Dynamic governance decisions on multi-modal inter-city travel during a large-scale epidemic spreading. *Transport Policy*, *104*(January), 29–42. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.01.008

Brendehaug, E., Aall, C., & Dodds, R. (2017). Environmental policy integration as a strategy for sustainable tourism planning: issues in implementation. *Journal of Sustainable Tourism*, *25*(9), 1257–1274. https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1259319

Brunetta, G., Monaco, R., Salizzoni, E., & Salvarani, F. (2018). Integrating landscape in regional development: A multidisciplinary approach to evaluation in Trentino planning policies, Italy. *Land Use Policy*, *77*(June), 613–626. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.05.024

Challies, E., Newig, J., Kochskämper, E., & Jager, N. W. (2017). Governance change and governance learning in Europe: Stakeholder participation in environmental policy implementation. *Policy and Society*, *36*(2), 288–303. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1320854

Dredge, D., & Jamal, T. (2015). Progress in tourism planning and policy: A post-structural perspective on knowledge production. *Tourism Management*, *51*, 285–297. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.06.002

Elliott, J. (1997). *Tourism; Politics and Public Sector Management* (First). Routledge.

Hajar, S., Ramlan, & Saputra, A. (2024). Environmental governance in the development of tourist village based local wisdom. *E3S Web of Conferences*, *506*, 1–10. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202450606008

Kementerian PUPR. (2020). *Integrated Tourism Master Plan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Itmp-Byp)*.

Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. B. (2021). Agile: A New Way of Governing. *Public Administration Review*, *81*(1), 161–165. https://doi.org/10.1111/puar.13202

Moerwanto, A. S., & Junoasmono, T. (2017). Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. *Jurnal HPJI*, *3*(2), 67–78.

Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2007). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship. In H. N. and J. P. Ulhoi (Ed.), *Edward Elgar Publishing Limited*. Edward Elgar Publishing, Inc. https://doi.org/10.4337/9781847204387

Nitivattananon, V., & Srinonil, S. (2019). Enhancing coastal areas governance for sustainable tourism in the context of urbanization and climate change in eastern Thailand. *Advances in Climate Change Research*, *10*(1), 47–58. https://doi.org/10.1016/j.accre.2019.03.003

Pariwisata, K. (2016, March). Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata indonesia 2016 - 2019. *Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata*.

Reid, D. G. (2017). Tourism, Globalization and Development. In *Tourism, Globalization and Development*. Pluto Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs56h

Rochim, B. K. E. T. A. I. (2018). Pengelolaan Kawasan Wisata Terintegrasi Di Kabupaten Ponogoro. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, *16*(1), 50–61. https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dia.v16i1.1927

Simarmata, M. M., & Triastuti. (2021). Identifikasi Potensi Pemanfaatan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan Kabupaten Samosir. *Jurnal Akar*, *10*(1), 25–30. https://doi.org/10.36985/jar.v10i1.469

Syariah, D. I. E. (2020). *Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah* (2019th–2020th ed.). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Volgger, M., & Pechlaner, H. (2015). Governing networks in tourism: what have we achieved, what is still to be done and learned? *Tourism Review*, *70*(4), 298–312. https://doi.org/10.1108/TR-04-2015-0013

https://ekonomi.republika.co.id/berita/sda5no457/bpolbf-ungkap-empat-isu-utama-pariwisata-labuan-bajo-ntt

https://travel.kompas.com/image/2020/08/31/150300827/10-tempat-wisata-di-labuan-bajo-bisa-ke-mana-saja?lgn_method=google&google_btn=onetap